

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, makmur dan damai sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan masih dijunjung tinggi sampai saat ini.

Dalam pelaksanaan hidup berbangsa dan bernegara, negara harus bisa memastikan bahwa setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya agar tercapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama tercapai apabila kesejahteraan individu terpenuhi, oleh karena itu, apabila negara ingin memajukan kesejahteraan bersama, maka negara wajib memelihara hak-hak individu yang merupakan hak-hak asasi manusia yang secara kodrat telah melekat pada diri tiap manusia.¹

M. Scheltema mengatakan bahwa “Setiap negara hukum terdiri dari empat asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.”² Asas kepastian hukum dapat diimplementasikan didalam sistem peradilan, yang terdapat dalam Lembaga Kepolisian,

¹ Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 107.

² Marwan Effendy. S.H., 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 142.

Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan.

Akhir-akhir ini Kejaksaan mendapat sorotan negatif dari masyarakat yang menurunkan citra dan kredibilitas Kejaksaan akibat perilaku dari beberapa oknum Jaksa. Untuk mengembalikan citra Kejaksaan, maka telah dilakukan program pembaruan Kejaksaan yang dilanjutkan peluncuran Program Reformasi Birokrasi, dengan harapan akan tercipta Kejaksaan yang lebih kredibel dan mengedepankan pelayanan publik dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang mengutamakan pelayanan publik, Kejaksaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, tidak saja kepada Presiden dan DPR tetapi juga kepada publik.³

Pada prinsipnya tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang Jaksa dalam

³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1859958-strategi-peningkatan-kinerja-kejaksaan/>, Jaksa Agung Hendarman Supandji, S.H., *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan*, tanggal 4 September 2009, jam 17:16.

menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang Jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, berlandaskan pada doktrin Tri Krama Adhyaksa, yaitu:

1. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan disusun menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. reformasi organisasi dan tata kerja Kejaksaan serta sumber daya manusia;
2. reformasi organisasi dan tata kerja bidang intelijen; dan
3. reformasi manajemen perkara.

Kejaksaan sebagai sentral penegakkan hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, penuntutan atau eksekusi atas tindak pidana korupsi, telah di perintahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung, untuk:

1. mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
2. mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) dalam rangka penegakan hukum; dan
3. meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁴

⁴ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3929/. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kebijakan Strategis dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 14 September 2009, jam 22:23.

Untuk mencapai kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan rencana tindak (*action plan*) dalam memberantas korupsi, selanjutnya Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004-2009, khususnya dalam bidang penindakan. Penindakan dalam RAN-PK 2004-2009 diartikan sebagai pengenaan sanksi/ hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/ nilai/ ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.⁵

Untuk mengaktualisasikan bidang penindakan dalam RAN-PK 2004-2009, ditetapkan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, antara lain:

1. Percepatan penanganan dan eksekusi tindak pidana korupsi
 - a. menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara dengan indikator yang akan dicapai, antara lain:
 - 1) memperjelas langkah-langkah pemberantasan korupsi;
 - 2) membuka peluang untuk menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar; dan
 - 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah untuk memberantas korupsi.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *loc. cit.*

- b. merumuskan dan menetapkan kriteria penentuan prioritas untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang telah ada untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah penyelesaian kasus meyangkut lembaga pelayanan publik dengan jumlah kerugian negara yang besar, sehingga masyarakat langsung dapat merasakan manfaat pemberantasan korupsi;
- c. mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset-aset hasil penyitaan negara dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah pengembalian kekayaan negara dan hasil-hasil penyitaan aset dengan mekanisme pembekuan dan pengadministrasian penyitaan aset yang baik;
- d. melakukan pembatalan terhadap SP3 perkara-perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

2. Peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum

- a. memberikan pelatihan bagi Hakim dan Jaksa spesialis menangani perkara korupsi, *asset tracing*, *legal audit*, *forensic accounting/ audit forensic* dan *public relation* dalam rangka proses peradilan dengan indikator pencapaian meningkatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dengan kompetensi tinggi;

- b. menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum;
- c. menyempurnakan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat termasuk atas perilaku/ sikap personel dengan indikator yang akan dicapai adalah masyarakat secara proaktif mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama korupsi di lembaga penegak hukum;
- d. mengimplementasikan Standar Profesi/ Kode Etik dengan indikator yang akan dicapai adalah standar kinerja aparatur penegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel.

Sebagai wujud kebijakan untuk memperbaiki kinerja Kejaksaan dan mempercepat penanganan tindak pidana korupsi, pada tahun 2007 dan 2008 formulasi kebijakan penanganan perkara adalah 5:3:1, yaitu 5 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Tinggi, 3 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Negeri dan 1 perkara ditangani oleh setiap cabang Kejaksaan Negeri.⁶

Pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) merupakan tugas dan wewenang dari Jaksa selaku eksekutor yang melaksanakannya sesuai dengan amar yang tercantum dalam suatu putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, Kejaksaan baru dapat melakukan eksekusi setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan, artinya,

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *loc. cit.*

meskipun telah divonis oleh penjara oleh Mahkamah Agung, tetapi salinan putusan kasasi belum diserahkan kepada Jaksa sebagai eksekutor, terpidana belum dapat dimasukan ke penjara.

Pelaksanaan putusan Hakim sebaiknya segera dilakukan untuk mencegah kaburnya terdakwa keluar negeri, apabila sebelumnya terdakwa tidak ditahan. Dari berita-berita yang sering muncul, diketahui bahwa pelaku korupsi yang sudah diputus seringkali tidak ditahan dengan berbagai macam alasan.

Tidak dipungkiri pula, terdapat indikasi kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang membantu koruptor melarikan dengan cara menghambat pengiriman salinan putusan ke Kejaksaan Negeri untuk dieksekusi. Masalah lain yang muncul adalah buruknya koordinasi diantara penegak hukum dan Imigrasi. Ketika koruptor kabur, yang sering terjadi antara pihak Pengadilan, Kejaksaan, dan Imigrasi malah saling menyalahkan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk menulis tentang “Eksekusi Putusan Hakim oleh Jaksa dalam Perkara Pidana Korupsi”.

⁷ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/14749/7/>, Anti Korupsi, *Koruptor, Kabur Lagi...Kabur Lagi...*, tanggal 21 Oktober 2009, jam 20:55.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi?
2. Adakah kendala dalam eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.

2. Bagi Kejaksaan

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Jaksa dalam eksekusi putusan Hakim dalam perkara pidana korupsi.

3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian hukum ini dapat dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian hukum ini dapat menambah wawasan Penulis mengenai eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian hukum ini adalah “Eksekusi Putusan Hakim oleh Jaksa dalam Perkara Pidana Korupsi”.

1. Eksekusi

Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati; penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.⁸

⁸ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*, tanggal 6 September 2009, jam 19:30.

2. Putusan Hakim

Pengertian putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹

3. Jaksa

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian Jaksa adalah pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses Pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.¹⁰

4. Hakim

Pengertian Hakim menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 210.

¹⁰ *Ibid.*

Pengertian Hakim adalah orang yang mengadili perkara; Pengadilan; juri; penilai; orang pandai-pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak.¹¹

5. Perkara

Pengertian perkara adalah masalah; persoalan; urusan; tindak pidana; tentang; mengenai.¹²

6. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.¹³

7. Korupsi

Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁴

8. Tindak pidana korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan seterusnya.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Eksekusi Putusan Hakim oleh Jaksa dalam Perkara Pidana Korupsi adalah proses pelaksanaan putusan Hakim oleh pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan untuk mengakhiri masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

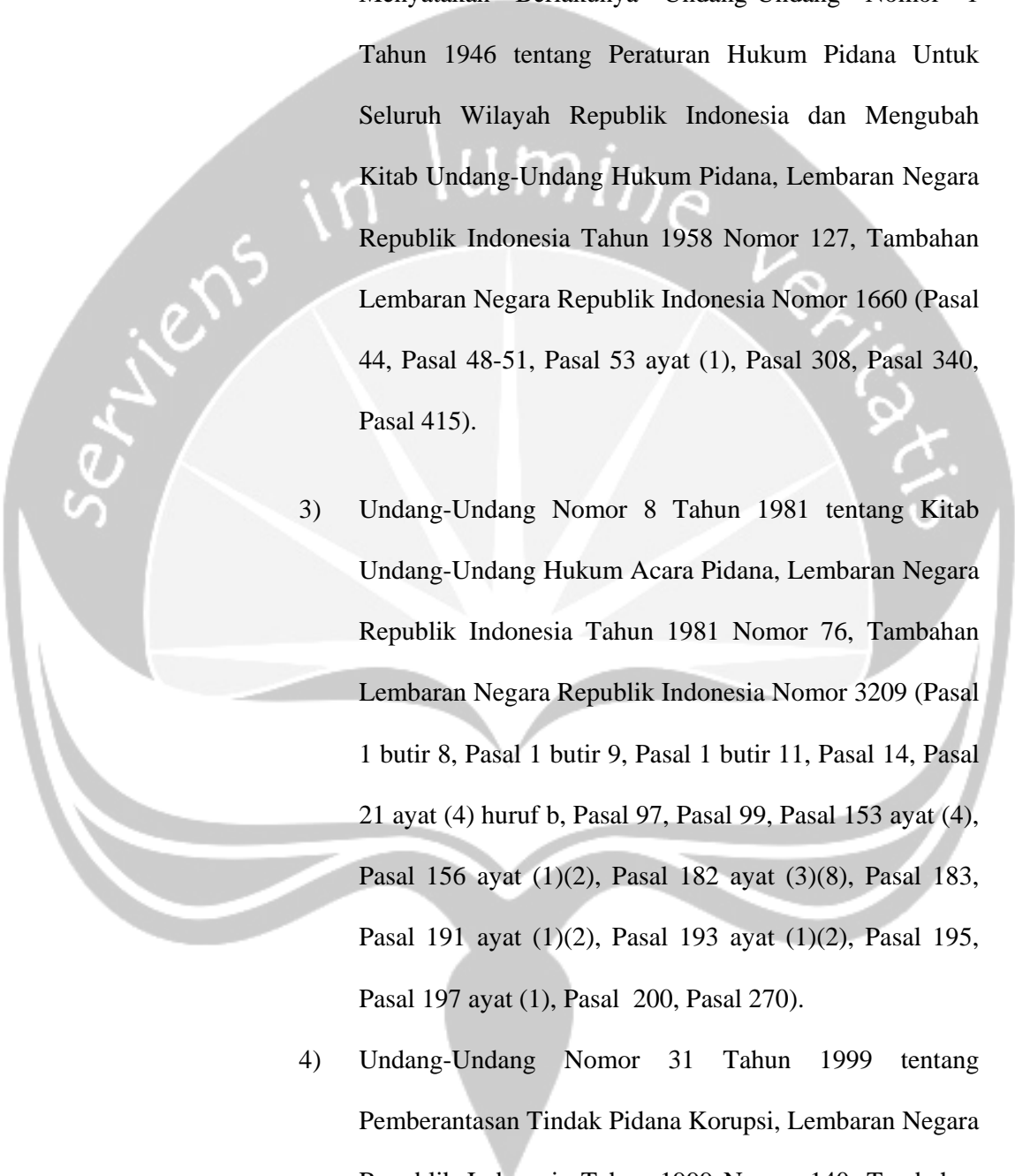
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, mencari buku-buku yang berkaitan dan berbagai macam literatur lainnya yang mempunyai kesamaan topik dan obyek penelitian serta didukung dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber yang terkait.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1).

- 
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 (Pasal 44, Pasal 48-51, Pasal 53 ayat (1), Pasal 308, Pasal 340, Pasal 415).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (Pasal 1 butir 8, Pasal 1 butir 9, Pasal 1 butir 11, Pasal 14, Pasal 21 ayat (4) huruf b, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 153 ayat (4), Pasal 156 ayat (1)(2), Pasal 182 ayat (3)(8), Pasal 183, Pasal 191 ayat (1)(2), Pasal 193 ayat (1)(2), Pasal 195, Pasal 197 ayat (1), Pasal 200, Pasal 270).
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18).

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10-12, Pasal 12 huruf e-f, Pasal 12 B).
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 (Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 2 ayat (1)(2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1)(2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30-34).
 - 7) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 17).
 - 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari segala sesuatu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari:

- 1) Buku tentang korupsi
- 2) Buku tentang Kejaksaan
- 3) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli
- 4) Putusan Hakim/ Pengadilan mengenai perkara tindak pidana korupsi (Putusan Pengadilan Nomor: 40/Pid/2009/PTY dan Putusan Pengadilan Nomor: 201/Pid.B/2004/PN. Slmn.)
- 5) Website.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait serta wawancara dengan nara sumber yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Sistematikasi secara vertikal, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan menggunakan penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 8 yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 33 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Pasal 17 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sistematikasi secara horizontal, yaitu membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya dengan menggunakan penalaran hukum non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30. Asas hukum yang berlaku adalah *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama yang mengatur hal yang sama, maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Interpretasi hukum secara gramatikal, yang mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/ bahasa hukum. Interpretasi sistematis, yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum. Serta interpretasi teleologi, yang didasarkan pada teleologi.

Berbagai macam data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dengan nara sumber berupa putusan pidana korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta kendala dalam eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi yang dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Langkah selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari nara sumber. Terakhir adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.

Penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum (tugas eksekusi putusan Hakim dalam perkara pidana khusus sama dengan tugas eksekusi putusan Hakim dalam

perkara pidana umum) dan berakhir pada suatu kesimpulan khusus (dalam eksekusi putusan Hakim dalam perkara pidana khusus banyak kendala seperti tersangka tidak ditahan sehingga bisa melarikan diri dan kendala mengenai pembayaran uang pengganti dan denda).



G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana korupsi.

BAB II : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DAN KENDALANYA

Terdiri dari peran Jaksa dalam peradilan pidana, antara lain macam, bentuk dan penggolongan putusan Hakim, pengertian Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan; penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, antara lain pengertian tindak pidana korupsi, sifat dan ciri-ciri tindak pidana korupsi, sebab terjadinya tindak pidana korupsi, bentuk dan jenis tindak pidana korupsi; dan pelaksanaan putusan pidana korupsi dan kendalanya, antara lain putusan Pengadilan tentang perkara pidana korupsi, pelaksanaan putusan Hakim, kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam melaksanakan putusan Hakim dalam perkara pidana korupsi.

BAB III : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.